

## Analisis Performa Keuangan Aspek Likuiditas dan Kinerja Layanan BLU Universitas Brawijaya Tahun 2017-2020

Pradita Galih Sekar Palupi, Muhammad Fawwaz Ananda, Dani Sugiri\*

Program Studi D-IV Manajemen Keuangan Negara, Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia

\*penulis korespondensi: danisugiri@pknstan.ac.id

### Kata Kunci:

BLU, kinerja keuangan, kinerja layanan

### Keywords:

Public Service Agency (PSA), financial performance, service performance

### ABSTRAK

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) merupakan salah satu institusi yang memberikan pelayanan publik di bidang pendidikan. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia, diperkenalkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU). Universitas Brawijaya (UB) mengadopsi PPK BLU sejak tanggal 17 Desember 2008. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, UB sebagai BLU belum pernah dilakukan penilaian kinerja keuangan yang berpedoman pada PER-28/PB/2019. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan BLU UB selama kurun waktu 4 (empat) tahun yaitu sejak tahun 2017–2020. Berdasarkan analisis rasio keuangan menurut PER-28/PB/2019, dari aspek likuiditas dan kinerja layanan menunjukkan bahwa kinerja BLU UB semakin membaik dari tahun ke tahun. Rasio keuangan BLU UB untuk aspek likuiditas selama tahun 2017 – 2020 memperoleh kriteria tinggi untuk rasio kas dan rasio lancar. Sedangkan periode penagihan piutang BLU UB termasuk dalam kriteria cepat yang mencerminkan peningkatan kemampuan BLU untuk mengkonversi piutang yang dimiliki menjadi kas. Selanjutnya dari aspek kinerja layanan, BLU UB memiliki kemandirian tinggi dalam kurun waktu empat tahun sehingga mampu meningkatkan kinerja operasional yang efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini memberikan pelajaran bahwa pengimplementasian pengelolaan keuangan BLU dapat meningkatkan kinerja keuangan satuan kerja penyedia layanan publik.

### Diterima:

9 April 2023

### Disetujui:

28 April 2023

### Dipublikasikan:

30 April 2023



### ABSTRACT

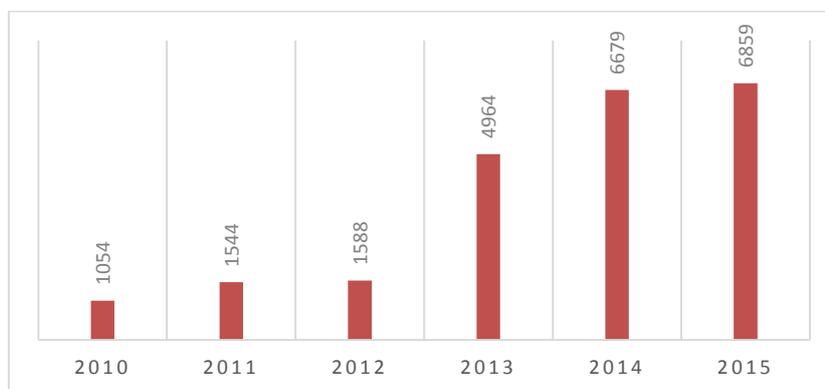
State Universities (PTN) are one of the institutions that provide public services in the field of education. In order to improve the quality of public services in Indonesia, a Public Service Agency Financial Management Pattern (PPK BLU) was introduced. Brawijaya University (UB) has adopted PPK BLU since December 17, 2008. Based on several previous studies, UB as a BLU has never conducted a financial performance assessment based on PER-28/PB/2019. This research is a descriptive qualitative research that aims to determine the financial performance of UB as a BLU for a period of four years starting from 2017 - 2020. Based on financial ratio analysis which refers to PER-28/PB/2019 in terms of liquidity and service performance, it shows that the performance of UB is getting better from year to year. The liquidity aspect of BLU's financial ratios during 2017 – 2020 obtained high criteria for cash ratios and current ratios. Meanwhile, BLU's receivable collection period includes quick criteria which reflects the increase in BLU's ability to convert its receivables into cash. Furthermore, from the aspect of service performance, BLU has high independence within a period of 4 (four) years so that it is able to improve its efficient operational performance in providing services to the community. This research provides a lesson that implementing BLU financial management can improve the financial performance of work units providing public services.

## 1. PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi pelayanan publik senantiasa mengalami perubahan ke arah yang lebih baik agar tercapai birokrasi sektor publik yang efisien dan efektif. Salah satu caranya yaitu dengan mengadopsi *New Public Management* (NPM). NPM memberikan penekanan terhadap transparansi, manajemen kinerja, dan akuntabilitas pegawai dan manajer sektor publik (Leishman et al., 1996 dalam Puspawati, 2016). Praktikanya, beberapa negara yang berhasil menerapkan NPM antara lain Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, dan Inggris (Choi 2015 dalam Efrina S et al., 2019). Indonesia juga melakukan reformasi birokrasi melalui Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang keuangan negara antara lain UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 (Efrina S et al., 2019).

Indonesia pada tahun 2015 memulai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 (Republik Indonesia, 2015). Pembangunan nasional yang kuat didasari dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang transparan, efektif, dan efisien. Namun menurut Triprasetya et al., (2014) pelayanan publik di Indonesia masih belum efektif, efisien, serta sumber daya pegawai belum memadai sehingga masih muncul keluhan dan pengaduan dari masyarakat sebagai pengguna layanan yang selanjutnya dilaporkan ke Ombudsman, sebagai pengawas pelayanan publik.

Dengan makin meningkatnya tuntutan publik akan kualitas pelayanan, maka pemerintah perlu lebih optimal dalam mendorong perbaikan kinerja pelayanan. Gambar 1 menunjukkan bahwa jumlah laporan masyarakat melalui Ombudsman Republik Indonesia mengalami peningkatan sejak tahun 2010 hingga tahun 2015. Pada tahun 2015, Ombudsman Republik Indonesia menerima pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi terhadap pelayanan publik dengan total 6.859 laporan. Hal ini menunjukkan urgensi dari penerapan reformasi dalam birokrasi pelayanan publik agar pelayanan menjadi lebih transparan, efisien, dan efektif.



Sumber: Ombudsman Republik Indonesia (2015).

**Gambar 1. Jumlah Laporan Masyarakat Tahun 2010 - 2015**

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan pelayanan publik yang fleksibel maka dibentuk suatu Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU. PP ini selanjutnya mengalami perubahan dengan ditetapkannya PP Nomor 74 tahun 2012. Badan Layanan Umum didefinisikan dalam PMK Nomor 220/PMK.05/2016 pasal 1 (1), BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan

mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (Kementerian Keuangan, 2016). PPK BLU memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan pelayanan publik untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan (Kementerian Keuangan, 2016; Pemerintah RI, 2012).

Pembentukan BLU berlandaskan tujuan bernegara yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Pemerintah RI, 2012). Agar pelayanan tersebut lebih fleksibel maka diperlukan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan BLU sesuai dengan amanat pasal 69 UU Nomor 1 Tahun 2004 (Pemerintah RI, 2004). Fleksibilitas dalam PPK BLU mencakup pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas serta pengadaan barang dan/atau jasa. Fleksibilitas PPK BLU tercermin dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, yang menyebutkan bahwa penerimaan BLU yang berasal dari APBN/APBD, jasa layanan yang diberikan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dan/atau hasil usaha lainnya dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU. PPK BLU wajib menerapkan praktik bisnis yang sehat dengan menyelenggarakan fungsi BLU sesuai dengan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam memberikan pelayanan bermutu dan berkelanjutan (Pemerintah RI, 2012).

Salah satu institusi yang memberikan pelayanan publik adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Tugas PTN yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman (Amirya et al., 2012). PTN membutuhkan pendanaan untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks tiap tahunnya. Menurut Kamars (1989), kondisi keuangan Perguruan Tinggi menentukan kualitas sumber daya manusia yang dicetaknya. Alokasi dana pendidikan dalam APBN dan APBD sebesar 20% dinilai masih belum mencukupi untuk memenuhi pengeluaran PTN (Andriani, 2007). Oleh karena itu, PTN mengadopsi PPK BLU untuk meningkatkan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya dengan berpedoman kepada paket peraturan keuangan negara. PTN dengan status BLU tidak diperkenankan mengeruk keuntungan dari uang kuliah tunggal yang disetorkan mahasiswanya (Maulana, 2019).

Keluwesannya PPK BLU tidak luput untuk diseimbangkan dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 yang mengatur proses perencanaan, penganggaran, hingga pertanggungjawaban dalam implementasi PPK BLU. Satuan kerja yang menerapkan PPK BLU tetap menjadi instansi pemerintah yang tidak dipisahkan. Oleh karena itu, seluruh pendapatan yang bersumber dari selain APBN/APBD harus dilaporkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban APBN/APBD (Pemerintah RI, 2012).

Fleksibilitas dalam PPK BLU berdampak terhadap meningkatnya kemampuan keuangan BLU (Pasaribu, 2014). Performa keuangan BLU pada kurun waktu tertentu tercermin dari kemampuan keuangannya. Performa keuangan ditunjukkan mulai dari proses menghimpun hingga menyalurkan pendapatan yang diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, serta profitabilitas (Jumingan, 2006). Iswahyudi (2018) menambahkan bahwa kinerja keuangan mencerminkan prestasi dan kesehatan kemampuan keuangan suatu entitas pada periode tertentu.

Menurut Sari et al. (2019), laporan keuangan disusun untuk menyajikan informasi terkait dengan kinerja dan posisi keuangan suatu entitas. Komponen laporan keuangan (LK) BLU sesuai PMK Nomor 220/PMK.05/2016 yang telah diubah dengan PMK Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU terdiri dari Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Kementerian Keuangan, 2016).

Pemerintah melalui KMK Nomor 361/KMK.05/2008 menetapkan Universitas Brawijaya sebagai salah satu PTN dengan status BLU di Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17 Desember 2008 (Amirya et al., 2012). Dengan ditetapkannya Universitas Brawijaya sebagai entitas BLU, maka dapat diterapkan PPK BLU dalam pengelolaan keuangan, pengembangan aset, serta layanannya kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Universitas Brawijaya juga menyandang gelar sebagai universitas negeri terbaik ketiga di Indonesia versi Webometrics tahun 2022 (Septiana, 2022).

Kinerja keuangan BLU bidang layanan pendidikan perlu dilakukan penilaian. Penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2013) terhadap Universitas Sebelas Maret yang berstatus sebagai BLU, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dalam kinerja keuangan dan pelayanan yang terlihat secara signifikan. Efrina S et al., (2019) telah melakukan penelitian untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan pelayanan Universitas Jambi dalam menerapkan PPK BLU. Dalam penelitian tersebut menghasilkan informasi terkait kinerja keuangan Universitas Jambi cukup baik dan telah memenuhi target yang telah ditentukan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Syahromi & Cheisviyanny (2020) terhadap penerapan PPK BLU di Universitas Negeri Padang menjelaskan bahwa terjadi dampak positif setelah diterapkannya PPK BLU antara lain dalam aspek fleksibilitas dalam manajemen keuangan, perencanaan keuangan, penggunaan dana, dan pelaporan keuangan.

LK BLU dilakukan analisis menggunakan teknik tertentu untuk mendapatkan informasi terkait kinerja dan posisi keuangan BLU (Kementerian Keuangan, 2019). Iswahyudi (2018) menjelaskan bahwa alat yang dapat digunakan untuk melakukan analisis keuangan yaitu rasio keuangan. Hal ini diperkuat dengan pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Penilaian Kinerja BLU Bidang Layanan Pendidikan, penilaian aspek keuangan BLU yaitu dengan melakukan penilaian kinerja BLU berdasarkan analisis data laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4 menyebutkan bahwa untuk melakukan penilaian keuangan BLU bidang layanan pendidikan dapat menggunakan rasio dengan cara membandingkan data-data keuangan dalam tiap-tiap pos pada LK (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015). Analisis LK akan menghasilkan suatu informasi yang selanjutnya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan suatu entitas (Sari et al., 2019).

Beberapa penelitian terdahulu di atas belum menggunakan PER-28/PB/2019 sebagai pedoman dalam analisis likuiditas dan kinerja layanan BLU. Penelitian ini menggunakan sampel yaitu UB sebagai fokus penelitian. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, UB sebagai BLU belum pernah dilakukan penilaian kinerja keuangan yang berpedoman pada PER-28/PB/2019. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan BLU Universitas Brawijaya selama kurun waktu 4 (empat tahun) yang dimulai dari tahun 2017 – 2020.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk mengumpulkan, menyusun, serta menganalisis data yang diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan atau informasi baru (Putri & Sugiri, 2021).

Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yaitu proses bertahap, dimulai dari identifikasi sumber data sekunder baik yang dipublikasikan maupun tidak dan berkaitan dengan penelitian (Sekaran & Bougie, 2013). Penelitian menggunakan data sekunder yaitu LK Universitas Brawijaya yang telah melalui tahapan audit periode tahun 2017 – 2020.

Analisis data menggunakan metode komparatif, membandingkan rasio LK Universitas Brawijaya tahun 2017 – 2020. Analisis kinerja keuangan BLU Universitas Brawijaya (UB)

menggunakan pedoman PER-28/PB/2019. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk mengukur kinerja dan posisi keuangan dari aspek likuiditas serta kinerja layanan (Kementerian Keuangan, 2019).

**a. Rasio Keuangan (Aspek Likuiditas)**

Parameter Rasio Keuangan yang digunakan dalam analisis kinerja pada aspek likuiditas adalah Rasio Kas (RK), Rasio Lancar (RL), Periode Penagihan Piutang (PPP). Formula RK, RL dan PPP sebagaimana ditunjukkan oleh persamaan (1), persamaan (2), dan persamaan (3).

$$RK = \frac{\text{Kas dan setara kas}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \dots\dots\dots (1)$$

$$RL = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \dots\dots\dots (2)$$

$$PPP = \frac{\text{Piutang Usaha} \times 360}{\text{Pendapatan Usaha}} \times 1 \text{ hari} \dots\dots\dots (3)$$

**b. Rasio Keuangan (Aspek Kinerja Layanan)**

Parameter Rasio Keuangan yang digunakan dalam analisis kinerja pada aspek kinerja layanan adalah Rasio Pendapatan Operasional terhadap Belanja Operasional (POBO), Rasio Belanja Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Rasio Imbal Jasa Layanan, Rasio Imbalan Ekuitas, dan Rasio Belanja Pegawai. Formula Rasio POBO, Rasio BOPO, Rasio Imbal Jasa Layanan, Rasio Imbalan Ekuitas, dan Rasio Belanja Pegawai sebagaimana ditunjukkan oleh persamaan (4) sampai dengan persamaan (8).

$$\text{Rasio POBO} = \frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Total Beban Operasional}} \dots\dots\dots (4)$$

$$\text{Rasio BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \dots\dots\dots (5)$$

$$\text{Rasio Imbal Jasa Layanan} = \frac{\text{Surplus/Defisit LO}}{\text{Pendapatan Operasional}} \dots\dots\dots (6)$$

$$\text{Rasio Imbalan Ekuitas} = \frac{\text{Surplus/Defisit LO}}{(\text{Ekuitas} - \text{Surplus/Defisit LO})} \times 100\% \dots\dots\dots (7)$$

$$\text{Rasio Belanja Pegawai} = \frac{\text{Belanja Pegawai}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\% \dots\dots\dots (8)$$

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Atas Laporan Keuangan BLU Universitas Brawijaya tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dilakukan analisis menggunakan metode komparatif. Analisis dilakukan dengan membandingkan rasio LK Universitas Brawijaya tahun 2017 – 2020. Analisis kinerja keuangan

atas laporan tersebut dilakukan menggunakan ukuran kinerja dan posisi keuangan dari aspek likuiditas serta kinerja layanan menurut ketentuan PER-28/PB/2019.

#### a. Rasio Kas

Rata-rata rasio kas BLU Universitas Brawijaya dari tahun 2017 – 2020 sebesar 1,8. Hal ini berarti kurang lebih terdapat 1,8 rupiah kas dan setara kas yang tersedia untuk membayar setiap rupiah kewajiban jangka pendek yang dimiliki. Dengan kata lain, setiap 1 rupiah kewajiban jangka pendek yang dimiliki oleh BLU, dijamin pembayarannya sebesar 1,8 kali dari jumlah kas dan setara kas yang dimiliki oleh BLU Universitas Brawijaya. Pada tahun 2020 terlihat penurunan rasio kas BLU Universitas Brawijaya. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah kewajiban jangka pendek BLU Universitas Brawijaya. Kondisi ini masih dapat diatasi dengan tersedianya likuiditas yang berlebih sehingga BLU Universitas Brawijaya mampu membayar seluruh kewajiban jangka pendek yang dimiliki. Tabel 1 menyajikan rasio kas BLU Universitas Brawijaya tahun 2017-2021.

**Tabel 1. Rasio Kas BLU Universitas Brawijaya Tahun 2017 – 2020**

Tahun	Nilai Rasio Kas	Kriteria (PER-28/PB/2019)
2017	1,86	Tinggi
2018	1,4	Tinggi
2019	2,28	Tinggi
2020	1,66	Tinggi

Sumber: Data diolah (2021)

#### b. Rasio Lancar

Rata-rata rasio lancar BLU Universitas Brawijaya dari tahun 2017 – 2020 sebesar 3,2. Rasio lancar ini mengindikasikan kemampuan BLU Universitas Brawijaya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya sebesar 3,2 terhadap total aset lancar yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 1 rupiah kewajiban jangka pendek BLU dijamin sebesar 3,2 kali aset lancar dan menjelaskan bahwa tingkat kesehatan keuangan yang dimiliki BLU tinggi. Pemicunya bersumber dari peningkatan aset lancar di tahun 2020 pada kas dan setara kas, piutang dari kegiatan operasional BLU, pos investasi jangka pendek, serta pendapatan yang masih harus diterima. Tabel 2 menyajikan rasio lancar BLU Universitas Brawijaya tahun 2017-2021.

**Tabel 2. Rasio Lancar BLU Universitas Brawijaya Tahun 2017 – 2020**

Tahun	Nilai Rasio Lancar	Kriteria (PER-28/PB/2019)
2017	3,15	Tinggi
2018	2,52	Tinggi
2019	3,31	Tinggi
2020	3,8	Tinggi

Sumber: Data diolah (2021)

#### c. Periode Penagihan Piutang

Rata-rata periode penagihan piutang BLU Universitas Brawijaya dari tahun 2017 – 2020 adalah 5,89. Tren periode penagihan piutang mengalami penurunan di tahun 2018 dan 2019 dan membaik di tahun 2020. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kemampuan BLU dalam mengkonversi piutang menjadi kas semakin cepat. Hal ini dapat dianggap sebagai peningkatan

kinerja BLU dalam pengelolaan piutang dari layanan yang telah disediakan. Tabel 3 menyajikan periode penagihan piutang BLU Universitas Brawijaya tahun 2017-2021.

**Tabel 3. Periode Penagihan Piutang BLU Universitas Brawijaya Tahun 2017 – 2020**

Tahun	Periode Penagihan Piutang (Hari)	Kriteria (PER-28/PB/2019)
2017	11,26	Cepat
2018	5,74	Cepat
2019	2,56	Cepat
2020	3,98	Cepat

Sumber: Data diolah (2021)

**d. Rasio POBO**

Rata-rata rasio POBO BLU Universitas Brawijaya dari tahun 2017 – 2020 sebesar 1,11 dan menunjukkan tingkat kemandirian BLU tergolong tinggi dalam 4 (empat) tahun terakhir. Tingkat kemandirian tertinggi dicapai pada tahun 2020. Semakin tinggi kemandirian BLU menunjukkan BLU semakin efektif dan mandiri dalam menjalankan kegiatan operasionalnya serta mampu mengurangi ketergantungan BLU terhadap APBN. Tabel 4 menyajikan rasio POBO BLU Universitas Brawijaya tahun 2017-2021.

**Tabel 4. Rasio POBO BLU Universitas Brawijaya Tahun 2017 – 2020**

Tahun	Nilai Rasio POBO	Kriteria (PER-28/PB/2019)
2017	1,11	Tinggi
2018	1,04	Tinggi
2019	1,07	Tinggi
2020	1,2	Tinggi

Sumber: Data diolah (2021)

**e. Rasio BOPO**

Tren rasio BOPO BLU Universitas Brawijaya mengalami penurunan dari tahun 2017 – 2020. Penurunan nilai rasio BOPO mencerminkan peningkatan efisiensi BLU Universitas Brawijaya dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Tabel 5 menyajikan rasio BOPO BLU Universitas Brawijaya tahun 2017-2021.

**Tabel 5. Rasio BOPO BLU Universitas Brawijaya Tahun 2017 – 2020**

Tahun	Nilai Rasio BOPO	Kriteria (PER-28/PB/2019)
2017	0,9	Cukup
2018	0,96	Cukup
2019	0,93	Cukup
2020	0,83	Cukup

Sumber: Data diolah (2021)

**f. Rasio Imbal Jasa Layanan**

Rasio imbal jasa layanan BLU Universitas Brawijaya tahun 2017 – 2020 bernilai positif dengan nilai yang fluktuatif. Rasio imbal jasa layanan dengan hasil positif menunjukkan bahwa kegiatan operasional BLU Universitas Brawijaya pada tahun 2017 – 2020 telah mampu menghasilkan surplus. Tabel 6 menyajikan rasio imbal jasa layanan BLU Universitas Brawijaya tahun 2017-2021.

**Tabel 6. Rasio Imbal Jasa Layanan BLU Universitas Brawijaya Tahun 2017 – 2020**

Tahun	Rasio Imbal Jasa Layanan
2017	0,10
2018	0,04
2019	0,07
2020	0,17

Sumber: Data diolah (2021)

**g. Rasio Imbalan Ekuitas**

Rasio imbalan ekuitas BLU Universitas Brawijaya mengalami penurunan menjadi 1% di tahun 2018 – 2019 dan meningkat menjadi 3% di tahun 2020. Peningkatan rasio imbalan ekuitas mencerminkan modal yang dimiliki oleh BLU UB mampu dikelola dengan baik oleh manajemen untuk meningkatkan kinerja BLU Universitas Brawijaya. Tabel 7 menyajikan rasio imbalan ekuitas BLU Universitas Brawijaya tahun 2017-2021.

**Tabel 7. Rasio Imbalan Ekuitas BLU Universitas Brawijaya Tahun 2017 – 2020**

Tahun	Rasio Imbal Ekuitas (%)
2017	3
2018	1
2019	1
2020	3

Sumber: Data diolah (2021)

**h. Rasio Belanja Pegawai**

Rasio belanja pegawai BLU Universitas Brawijaya dari tahun 2017 – 2020 berada di kisaran 43,5%. Nilai ini menunjukkan bahwa belanja pegawai dibiayai oleh pendapatan operasional BLU Universitas Brawijaya dikisaran 40%. Namun berdasarkan rasio BOPO dan rasio imbal jasa layanan dijelaskan bahwa terjadi peningkatan efisiensi BLU serta kegiatan operasional BLU di tahun 2017 – 2020 sehingga BLU Universitas Brawijaya mampu menghasilkan surplus. Oleh karena itu, belanja pegawai yang dilakukan oleh BLU Universitas Brawijaya dinilai masih efisien dalam rangka menjalankan kegiatan operasional BLU. Tabel 8 menyajikan rasio belanja pegawai BLU Universitas Brawijaya tahun 2017-2021.

**Tabel 8. Rasio Belanja Pegawai BLU Universitas Brawijaya Tahun 2017 – 2020**

Tahun	Rasio Belanja Pegawai (%)
2017	44
2018	45
2019	42
2020	43

Sumber: Data diolah (2021)

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan hasil yang sejalan dengan penelitian Maharani (2013) dengan objek BLU UNS, dan penelitian Efrina S et al., (2019) dengan objek BLU Universitas Jambi. Secara umum penelitian juga menguatkan hasil penelitian Syahromi & Cheisviyanny (2020) atas penerapan PPK BLU di Universitas Negeri Padang serta penelitian Sari et al. (2019) yang meneliti mengenai kinerja dan keuangan BLU bidang Pendidikan. Implementasi pengelolaan BLU memberi dampak positif fleksibilitas keuangan serta kinerja keuangan organisasi.

#### 4. KESIMPULAN

Universitas Brawijaya mengadopsi PPK BLU sejak 2008 hingga tahun 2021 dengan maksud dapat meningkatkan pelayanan dan kinerja melalui pemanfaatan fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan berpedoman kepada paket peraturan keuangan negara. Berdasarkan perhitungan analisis rasio keuangan yang mengacu pada PER-28/PB/2019 ditinjau dari aspek likuiditas dan kinerja layanan menunjukkan kinerja BLU Universitas Brawijaya semakin membaik dari tahun ke tahun. Rasio keuangan BLU aspek likuiditas selama tahun 2017 – 2020 memperoleh kriteria tinggi untuk rasio kas dan rasio lancar. Sedangkan periode penagihan piutang BLU termasuk kriteria cepat yang mencerminkan peningkatan kemampuan BLU untuk mengkonversi piutang yang dimiliki menjadi kas. Selanjutnya dari aspek kinerja layanan, BLU memiliki kemandirian tinggi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun sehingga mampu meningkatkan kinerja operasional yang efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa implementasi PPK BLU terbukti mendorong peningkatan kinerja likuiditas dan kinerja keuangan BLU Universitas Brawijaya.

#### 5. SARAN

Penelitian selanjutnya disarankan melaluikan pembuktian hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian lebih luas dapat dilakukan dengan melibatkan beberapa PTN berstatus BLU. Dengan perubahan status badan hukum Universitas Brawijaya dari BLU menjadi PTN Badan Bukum (PTN BH) pada tahun 2021, makan penelitian selanjutnya juga dapat membandingkan kinerja keuangan sebelum dan sesudah Universitas Brawijaya sebelum dan sesudah perubahan status badan hukum.

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

- Amirya, M., Djamhuri, A., & Ludigdo, U. (2012). PENGEMBANGAN SISTEM ANGGARAN DAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA: PERSPEKTIF INSTITUSIONALIS. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 3(3), 334–501.
- Andriani, D. E. (2007). Pengembangan Sumber-Sumber Pendapatan Perguruan Tinggi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 44–55.

- Efrina S, L., Diah P A, E., & Aurora L, T. (2019). Evaluasi Kinerja Keuangan dan Pelayanan Universitas Jambi Dalam Penerapan Pola Keuangan Badan Layanan Umum. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 4(3), 53–67. <https://doi.org/10.22437/jaku.v4i3.8137>.
- Iswahyudi, T. N. (2018). Analisis Kinerja Keuangan BLU pada Rumah Sakit Umum Daerah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 3(4), 22.
- Jumingan. (2006). *Analisa Laporan Keuangan*. Bumi Aksara.
- Kamars, H. M. D. (1989). *Sistem Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi, Suatu Studi Perbandingan Antar Beberapa Negara*. Depdikbud, Dirjen Dikti, P2LPTK.
- Kementerian Keuangan. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/220~PMK.05~2016Per.pdf>.
- Kementerian Keuangan. (2019). *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-28/PB/2019 tentang Pedoman Telaah dan Analisis Laporan Keuangan BLU oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-32/PB/2014/ tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan*.
- Maharani, A. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. *Jupe UNS*, 1(3), 1–10.
- Maulana, M. S. (2019). Menristekdikti: BLU Harus Menjadi Praktik Bisnis yang Sehat. *Profesi-UNM*. <https://profesi-unm.com/2019/04/27/menristekdikti-blu-harus-menjadi-praktik-bisnis-yang-sehat/>.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2015). *Laporan Tahunan 2015*. Ombudsman Republik Indonesia.
- Pasaribu, M. (2014). *Analisis Terhadap Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum: Isu dan Tantangannya*. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU. <http://blu.djpbk.kemenkeu.go.id/index.php?r=publication/article/view&id=4>.
- Pemerintah RI. (2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40446/uu-no-1-tahun-2004>.
- Pemerintah RI. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*.
- Puspawati, A. A. (2016). PENERAPAN NEW PUBLIC MANAGEMENT (NPM) DI INDONESIA (Reformasi Birokrasi, Desentralisasi, Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik). *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 1(1), 38–53.
- Putri, S., & Sugiri, D. (2021). Menilik Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan PBB-P2 untuk Peningkatan PAD dalam Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus Kota Bandar Lampung. 10(2), 15. <https://doi.org/10.32639/jiak.v10i2.864>.
- Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015—2019*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41718/perpres-no-2-tahun-2015>.

- Sari, Y., Masnila, N., Widyastuti, E., & Wahyudi, R. (2019). ANALISIS KOMPARASI ATAS KINERJA DAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENYEDIAAN JASA PENDIDIKAN. *JOURNAL OF APPLIED BUSINESS ADMINISTRATION*, 3(2), 271–280. <https://doi.org/10.30871/jaba.v3i2.1728>.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). *Research Methods for Business* (6 ed.). John Wiley and Sons Inc.
- Septiana, T. (2022). 15 Universitas Negeri Terbaik Indonesia Versi Webometrics 2022, Kampus Ini Nomor 1. *Kontan*. <https://lifestyle.kontan.co.id/news/15-universitas-negeri-terbaik-indonesia-versi-webometrics-2022-kampus-ini-nomor-1>.
- Syahromi, M., & Cheisviyanny, C. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Di Universitas Negeri Padang. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 2(2), 2839–2860. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.253>.
- Triprasetya, A. S., Laksono, T., & Putu Eka, N. L. (2014). Analisis Kesiapan Penerapan Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Di KabupatenKulon Progo (Studi Kasus Di Puskesmas Wates Dan Puskesmas Girimulyo II Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 3(3), 124–137. <https://doi.org/10.22146/jkki.36376>.